

**INTER-KONEKTIF SOSIAL BUDAYA PARTAI POLITIK
MEREALISASIKAN TINDAKAN KESETARAAN GENDER
(Studi Pada Partai Golongan Karya di Kabupaten Bima)**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Sosiologi**



Disusun Oleh:

**MUSAFIR
NIM : 201720270211018**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
November 2017**

**INTER-KONEKTIF SOSIAL BUDAYA PARTAI POLITIK
MEREALISASIKAN TINDAKAN KESETARAAN GENDER
(Studi Pada Partai Golongan Karya di Kabupaten Bima)**

**MUSAFIR
201720270211018**

Telah Disetujui
Pada Hari/Tanggal, **Senin/ 18 November 2019**

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Ishomuddin



Akhsanul Irfam, Ph.D

Pembimbing Pendamping



Dr. Muslimin Machmud

Ketua Program Studi
Magister Sosiologi



Prof. Dr. Ishomuddin

TESIS

MUSAFIR
201720270211018

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Selasa/ 05 November 2019
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Ketua / Penguji | : Prof. Dr. Ishomuddin |
| Sekretaris / Penguji | : Dr. Muslimin Machmud |
| Penguji | : Dr. Wahyudi, M.Si |
| Penguji | : Dr. Fauzik Lendriyono |

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **MUSAFIR**
NIM : **201720270211018**
Program Studi : **Magister Sosiologi**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **INTER-KONEKTIF SOSIAL BUDAYA PARTAI POLITIK MEREALISASIKAN TINDAKAN KESETARAAN GENDER (Studi Pada Partai Golongan Karya di Kabupaten Bima)** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 11 November 2019



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis berjudul **“INTER-KONEKTIF SOSIAL BUDAYA PARTAI POLITIK MEREALISASIKAN TINDAKAN KESETARAAN GENDER (Studi Pada Partai Golongan Karya (Golkar) di Kabupaten Bima)”**.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Dua (S2) Jurusan Sosiologi Politik, Program Studi Magister Sosiologi pada Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis berterimakasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan Tesis ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Fauzan, M.Pd, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Dr. Latifun, M.Kes, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang
3. Bapak Prof. Dr. Ishomuddin, selaku Ketua Program Studi Magister Sosiologi sekaligus dosen pembimbing utama, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan tesis ini.
4. Bapak Dr. Muslimin Machmud, selaku dosen pembimbing pendamping yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Wahyudi, M.Si, selaku penguji yang memberikan usulan dan saran serta kritikan yang membangun sehingga penulisan tesis dapat diselesaikan.
6. Bapak Dr. Fauzik Lendriyono, selaku Sekretaris Program Studi Magister Sosiologi sekaligus penguji yang memberikan bimbingan, saran, dan kritikan yang membangun dalam penulisan tesis ini.
7. Seluruh dosen dan staf administrasi serta petugas perpustakaan pada program pascasarjana UMM, yang secara langsung atau tidak langsung

telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.

8. Teristimewa untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan doa dan motivasinya selama ini. Jasa mereka tak akan hilang sampai akhir hayat.
9. Yang dibanggakan Kakanda Kurniawan, yang selalu memberikan nasehat dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan S2 di Universitas Muhammadiyah Malang.
10. Buah hati tercinta Elsa Salsabillah, yang ditempatkan sebagai motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Seluruh rekan-rekan Komunitas Mbojo Matunti (Kambutu) yang telah saling mendukung dan memotivasi serta memberikan sumbangsi pemikiran sehingga penulisan tesis dapat diselesaikan.
12. Seluruh rekan-rekan FKMPD yang telah saling mendukung melalui perjuangan bersama-sama, serta senior dan junior FKMPD, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga penulisan tesis dapat diselesaikan.
13. Seluruh adik-adik KKWM, yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang Ilmu Sosiologi Politik di Perguruan Tinggi serta bermanfaat bagi para pembaca. Amin yaa rabbal alamin.

Malang, 11 November 2019
Penulis

Musafir
NIM. 201720270211018

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| PENDAHULUAN | |
| Latar Belakang..... | 1 |
| TINJAUAN PUSTAKA | |
| Penelitian Terdahulu | 6 |
| Pengarusutamaan Gender | 8 |
| Tujuan Pengarusutamaan Gender | 9 |
| Konsep Gender dan Jenis Kelamin | 10 |
| Konsep Keadilan dan Kesetaraan | 11 |
| Permasalahan Ketidaksetaraan Gender | 13 |
| Pentingnya Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik | 14 |
| Perspektif Teori | 15 |
| Kerangka Berpikir..... | 17 |
| Fokus Penelitian | 17 |
| METODE PENELITIAN | |
| Paradigma Sosiologi | 18 |
| Pendekatan Penelitian, Jenis, dan Subyek Penelitian | 19 |
| Teknik Pengumpulan Data | 19 |
| Teknik Analisis Data dan Uji Keabsahan Data | 20 |
| HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| Tindakan Rasional Tujuan | 21 |
| Tindakan Rasional Nilai | 25 |
| KESIMPULAN | |
| Kesimpulan..... | 29 |
| Saran | 30 |
| DAFTAR PUSTAKA | 30 |
| LAMPIRAN | |

**INTER-KONEKTIF SOSIAL BUDAYA PARTAI POLITIK
MEREALISASIKAN TINDAKAN KESETARAAN GENDER
(Studi Pada Partai Golongan Karya di Kabupaten Bima)**

Musafir

Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2019

Email: 93shafir@gmail.com

ABSTRAK

Hj. Indah Damayanti Putri merupakan figure perempuan yang menjabat sebagai Bupati Bima sekaligus ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Golkar di Kabupaten Bima. Hal ini menjadi fenomena menarik, karena melihat tindakan sosial partai Golkar Kabupaten Bima yang rasional memilih figure perempuan yang memiliki pengaruh besar secara sosial budaya di tengah masyarakat Kabupaten Bima. Dari keterkaitan tersebut penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tindakan partai Golkar Kabupaten Bima merealisasikan tindakan kesetaraan gender melalui interkoneksi dengan kondisi sosial budaya dalam rekrutmen politik.

Dengan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif jenis naturalistic, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam mengkaji Inter-Konektif Sosial Budaya Partai Politik Merealisasikan Tindakan Kesetaraan Gender Studi Pada Partai Golongan Karya (golkar) di Kabupaten Bima dianalisis dengan paradigma sosiologi yakni Definisi Sosial dan teori Tindakan Sosial menurut Max Weber.

Hasil penelitian ini adalah tipe tindakan sosial partai Golkar Kabupaten Bima merealisasikan kesetaraan gender ditemukan ada dua tipe tindakan yakni tindakan rasional tujuan dan tindakan rasional nilai. Tindakan rasional tujuan pengurus harian DPD partai Golkar yakni menempatkan figure perempuan sebagai ketua partai, menyalurkan bantuan sosial, dan mengadakan kegiatan sosial budaya. Juga strategi yang dipertimbangkan dan dianggap efektif dalam mencapai tujuan merealisasikan kesetaraan gender, pengurus harian DPD Golkar menjadikan organisasi sayap sebagai wadah untuk menyeleksi dan meningkatkan peran dan partisipasi perempuan, mempelajari dengan baik sekaligus memetakan kondisi sosial budaya diberbagai dapil, dan membentuk tim survey untuk memperhatikan rekam jejak perempuan dan laki-laki. Sementara tindakan rasional nilai, tampak pada tindakan pengurus harian DPD partai Golkar yang menempatkan nilai sosial budaya seperti tingkat pendidikan, status sosial, kecakapan, dan kedekatan di tengah masyarakat, kejujuran, dan rasa amanah sebagai dasar dalam menjalankan rekrutmen politik demi menciptakan peran dan partisipasi perempuan diinternal partai Golkar lebih meningkat dan setara dengan kaum laki-laki.

Kata Kunci: Inter-Konektif, Pengarusutamaan Gender, dan Sistem Sosial Budaya.

**INTER-CONNECTIVE SOCIAL CULTURE OF POLITICAL PARTY IN
REALIZING THE EQUALITY OF GENDER ACTION
(Study on Golkar, one of the political party in Bima District)**

Musafir

University of Muhammadiyah Malang 2019

Email: 93shafir@gmail.com

ABSTRACT

Hj. Indah Damayanti Putri is a female figure that served as a leader of Bima regent as well as chairman of the Regional Leadership Board (DPD) Golkar, one of political party in Bima district. This becomes an interesting phenomenon, because it sees from the social action of Golkar in Bima Regency which rational choose a female figure that has a major social influence in the midst of the community of Bima Regency. Based on this relation, this research aims to describe the action of Golkar in Bima District to realize the action of gender equality through inter-connective with socio-cultural conditions in political recruitment.

By using the methods of research that used in qualitative-descriptives with naturalistic type, the collection of data will be done by observation, interviews, and documentation in reviewing Inter-connective Social Culture Political Party Realize Action Gender Equality Study on one of the political party (Golkar) in Bima District was analyzed by the sociological paradigm namely Social Definitions and Social Action theory according to Max Weber.

The result of this research is the type of Golkar social action in Bima District that realize the equality of gender which already found that there are two kinds of actions that is the rational action of purpose and the rational action of value. The rational action of purpose of DPD's daily manager in Golkar which is placing female figures as the chairman of party, channeling social assistance, and conduct social culture activities. The strategies considered and deemed effective in achieving the goal of realizing gender equality, the daily manager of DPD Golkar made the organization of the wing as a container to select and enhance the role and participation of women, to study well and to chart social and cultural conditions, and to form a survey team to pay attention to the track record of women and men. While rational action of value, seen in the action of the Daily management of the DPD Golkar party that puts social values of culture such as education, social status, proficiency, and proximity in society, honesty, and trust as the basis of the In conducting political recruitment to create the role and participation of women in internal Golkar party is increasing and equal to men.

Keywords : Inter-connective, Gender Mainstreaming, and Social Culture System

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|---|---------|
| 1. 2 Kerangka Berpikir Penelitian | 17 |
| 1. 3 Diagram Tindakan Rasional Tujuan Pengurus Harian Golkar | 22 |
| 2. 4 Diagram Tindakan Rasional Nilai Pengurus Harian Golkar | 29 |

PENDAHULUAN

Kajian tentang inter-konektif berawal dari sebuah paradigma menuju implementasi-aplikatif nyata di lapangan (Hidayat, 2014). Konsep ini memandang bahwa terjadinya sebuah fenomena sosial dalam lingkungan hidup masyarakat tidak berdiri dengan sendirinya tanpa ada korelasi atau hubungan dengan fenomena lain secara kompleksitas.

Amin Abdullah dalam (Hidayat, 2014) menjelaskan bahwa inter-konektif adalah usaha memahami kompleksitas fenomena kehidupan yang dihadapi dan di jalani manusia, setiap bangunan keilmuan apapun, baik keilmuan agama (Islam maupun agama-agama lain), keilmuan sosial, humaniora, maupun kealaman tidak dapat berdiri sendiri tanpa kerja sama, saling tegur sapa, saling membutuhkan, saling koreksi, dan saling berhubungan antar satu dengan yang lain

Dalam penelitian ini mengidentifikasi terkait fenomena sosial dari keterkaitan kondisi sosial budaya yang ditinjau dari dua konteks pendekatan keterkaitan (inter-konektif) tentang perjalanan peran dan partisipasi sosial perempuan di Kabupaten Bima yakni; *Pertama*, pendekatan secara historis tentang penghambat peran dan partisipasi sosial perempuan di Kabupaten Bima. *Kedua*, pendekatan era kekinian tentang penghambat dan perubahan posisionim perempuan serta bergesernya *mainset* berfikir perempuan lebih maju dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang pembangunan.

Ditinjau secara historis, dalam buku “Tradisi Dalam Siklus Hidup Masyarakat Sasak, Sumbawa, dan Mbojo” yang ditulis Naniek I. Taufan, menjelaskan bahwa masyarakat Bima pada masa kesultanan, merupakan masyarakat yang kuat dan kental dalam memegang teguh filosofi hidup yaitu “*Maja Labo Dahu*” yang artinya malu dan takut. Perempuan dalam filosofi ini, dijaga dan diatur terkait keberadaannya di tengah kehidupan bermasyarakat baik dalam keluarga maupun di masyarakat. Di dalam keluarga perempuan hanya diajarkan untuk mengurus barang-barang domestik, seperti: menenun, memasak, cuci piring, pakaian, dan lain sebagainya. Di tengah masyarakat perempuan dalam berbusana diharuskan aurahnya dalam keadaan tertutup menggunakan busana “*Rimpu*” artinya berhijab sebagaimana yang dianjurkan ajaran Islam. Perempuan berhijab menggunakan “*Tembe Nggoli*” (artinya Sarung Nggoli), sarung khas

daerah Bima. Pada masa kesultana Bima, sulit menemukan perempuan yang tidak bisa menenun sarung "*Nggoli*" khas daerah Bima.

Dalam buku "Nika Baronta" yang ditulis Alan Malingi, (2007: 22) menjelaskan bahwa budaya masyarakat Bima pada masa kesultanan adalah masyarakat yang melestarikan budaya "Magrib Mengaji". Lantunan ayat suci Al-Qur'an membahana keluar dari bibir anak-anak dan muda mudi disetiap rumah penduduk.

Jongker, dalam bukunya yang berjudul "Keluarga Tuli Humor Rakyat Bima Tempo Doeloe" yang mengharuskan bahwa pendidikan itu berbasis pada kearifan local masing-masing daerah. Jongker, menjelaskan juga tentang ruang pendidikan perempuan pada masa kesultanan yang diklasifikasi menjadi dua menurut kelas sosial keluarga mereka yaitu; *pertama*, perempuan keturunan darah biru yakni disekolahkan ke sekolah yang didirikan kaum penjajah Belanda dan Jepang, dan *kedua*, perempuan keturunan rakyat biasa hanya mengenal pendidikan dalam ruang lingkup keluarga.

Pendeskripsian di atas menunjukkan peran dan partisipasi perempuan secara sosial budaya pada masa kesultanan benar-benar dibatasi dimana dalam bidang pendidikan perempuan ketika itu tidak mendapatkan pendidikan secara merata. Dari aspek budaya "Magrib Mengaji" dan filosofi "*Maja Labo Dahu*", perempuan sejak usia dini sampai berkembang dewasa benar-benar dididik menjadi perempuan yang memiliki keperibadian yang baik dan dididik untuk bisa mengurus barang-barang domestic dalam keluarga. Perempuan dalam filosofi "*Maja Labo Dahu*" dan budaya "Magrib Mengaji" memang membentuk pribadi perempuan yang memiliki rasa malu dan takut ketika berbuat salah serta memegang teguh nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Namun disisi lain, posisi perempuan sebagai makhluk sosial dalam pendekatan ini terlihat dibatasi karena ruang interaksi sosial atau peran sosial perempuan khusus di bidang politik ketika itu hampir tidak ditemukan.

Tujuan meningkatkan peran dan partisipasi politik perempuan di bidang politik, tidak sekedar memenuhi minimal kuota 30 persen keterwakilan perempuan dan meningkatkan kuantitas jumlah perempuan di panggung politik. Tetapi, agar supaya perempuan dapat memperjuangkan dan mengelola dengan

baik hak-hak politik mereka di panggung politik dan agar bisa terintegrasi dalam kehidupan publik secara adil. Dengan demikian, partai politik sebagai kendaraan politik yang memiliki fungsi menjalankan rekrutmen politik harus memperhatikan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pasal 248 ayat 3 tertera dengan jelas menyatakan bahwa “Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% keterwakilan perempuan”. Juga salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pada pasal 6 ayat 3 menyatakan bahwa “partai politik yang tidak memenuhi pengajuan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan tidak dapat diterima.”

Memahami maksud dan tujuan keberadaan aturan formal tentang keterwakilan perempuan dalam bidang politik, maka perjuangan untuk meningkatkan peran dan partisipasi perempuan agar mendapatkan kesetaraan dan keadilan di dunia publik oleh berbagai elemen harus terus ditingkatkan dalam lembaga penentu dan pembuat kebijakan. Meskipun disisi lain perempuan juga tidak berhenti untuk berpartisipasi dalam segala bentuk pembangunan, terlebih di era otonomi seperti di daerah Kabupaten Bima.

Dalam konteks kekinian, peneliti masih melihat ada 4 (empat) faktor penghambat bagi perempuan untuk eksis di dunia politik di daerah Kabupaten Bima, yaitu: *Pertama*, masyarakat Bima merupakan masyarakat yang terkenal kuat dan kental dalam beragama. Sehingga, konstruksi cara berfikir masyarakat berdasarkan teks Al-Qura'an, Artinya: “*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka*”. Firman Allah SWT tersebut menjelaskan bahwa laki-laki merupakan seorang imam bagi perempuan. Perempuan ketika menempati posisi penting di panggung politik, dianggap sudah di luar koridornya sebagai ma'amum bagi laki-laki. *Kedua*, pengetahuan perempuan tentang politik yang kurang memadai terhadap substansi dasar keberadaan mereka baik sebagai pengurus partai maupun sebagai anggota parlemen. *Ketiga*, adanya *cost politic* yang melahirkan praktik mahar politik.

Keempat, partai politik kurang disiplin dalam menjalankan mekanisme rekrutmen politik.

Faktor lain, masyarakat saat ini menempatkan politik sebagai alat praktis yang tidak merepotkan mereka ketika membutuhkan sesuatu (praktis dan instan). Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek seperti; meminjam uang, pipa, mesin pompa air, kawat beronjol, dan lain sebagainya. Budaya politik masyarakat yang demikian, menjadi dasar berfikir dan bertindak setiap orang yang akhirnya membentuk konstruksi sosial dengan relasi yang timpang bagi terhambatnya keterwakilan perempuan di panggung politik dan berdampak dalam mengambil keputusan baik di wadah keluarga, masyarakat dan negara.

Selanjutnya tindakan partai politik yang kurang memperhatikan fungsinya sebagai sarana meningkatkan peran dan partisipasi dalam rekrutmen politik, justru menunjukkan kelembagaan partai-partai yang ada di daerah Bima sedang berada pada titik terendah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang pengamat politik di Kabupaten Bima, yakni Bapak Dr. Syarif Ahmad, M.Si mengatakan:

“Saya melihat begini, terkait mekanisme rekrutmen partai politik terhadap anggota partainya sekarang, itu lebih pada tujuan teknis semata yaitu sebagai pendulang suara semata. Sebagai bukti saya melihat semua partai politik kemarin stress dan frustrasi mencari keterwakilan perempuan 30 persen. Sehingga rekrutmen caleg perempuan yang mereka terapkan tidak sesuai dengan mekanisme yang sesungguhnya seperti misalnya melakukan proses ideologisasi melalui kaderisasi terhadap kader-kadernya.”

Tinjauan secara kultur, sebenarnya kultur masyarakat Bima pada umumnya merupakan masyarakat yang menempatkan karakter perempuan berkarakter sama seperti karakternya laki-laki yang tegas dalam mengambil suatu keputusan. Karena budaya masyarakat Bima memiliki kesamaan dengan budaya-budaya masyarakat pesisir, yang selalu dalam keadaan terbuka memberikan ruang bagi perempuan untuk ikut berperan dan berpartisipasi dalam segala bidang pembangunan.

Seiring berkembangnya zaman yang modern, perempuan di Bima saat ini sudah mengalami pergeseran cara berfikir ke arah yang lebih maju. Partisipasi mereka di bidang pendidikan sudah mulai terlihat untuk memperjuangkan masa depan mereka. Menurut berita yang dirilis NursaMedia tentang “*Inilah Daftar Nama Mahasiswa Dompus-Bima yang Bakal ke Malaysia*”, menunjukkan bahwa

dari jumlah 15 nama mahasiswa Dompu-Bima, diantaranya 6 orang perempuan yang melanjutkan studi strata dua (S2) di Universitas Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Malaysia.

Ditinjau dari segi system social, peneliti melihat bahwa perempuan di daerah Kabupaten Bima sudah mulai menunjukkan keterlibatan mereka ke dalam system ini. Dengan dibuktikan bahwa keberadaan perempuan di beberapa organisasi sosial, seperti di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Majelis alim, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta di lembaga birokrasi pemerintahan lainnya di daerah Kabupaten Bima. Bahkan akhir-akhir ini kondisi sosial budaya masyarakat Bima memberikan ruang bagi perempuan dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menduduki posisi strategis sebagai pejabat publik di daerah Kabupaten Bima.

Pemilu legislatif 2014, dari 45 anggota DPRD Kabupaten Bima diantaranya 4 (empat) orang perempuan yang terpilih sebagai wakil rakyat. Empat perempuan tersebut dari Caleg yang diusung oleh partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), dan partai Nasional Demokrat.

Menariknya dalam penelitian ini, pada Pilkada serentak tahun 2015 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), seorang perempuan bernama Hj. Indah Damayanti Putri yang diusung partai Golkar sebagai Calon Bupati, telah berhasil dan dilantik secara resmi sebagai Bupati Bima oleh Gubernur NTB (Dr. Muhammad Zainal Majdi) di Hotel Lombok Raya Mataram, pada tanggal 17 Februari 2016 (Lihat: m.republika.co.id). Fenomena ini menjadi sejarah pertama di daerah Bima, dimana perempuan dipercayakan oleh masyarakat Kabupaten Bima memegang posisi strategis sebagai pejabat publik di Kabupaten Bima. Namun, menelaah *trak record* dari Hj. Indah Damayanti Putri, ia merupakan istri dari mantan Bupati Bima (Al. H. Ferry Zulkarnain, ST) yang dikenal oleh masyarakat Bima sebagai putra mahkota Sultan Bima, anak sulung Putra Abdul Kahir, yang juga menjabat sebagai Bupati Bima pada tahun 1950-1967.

Dari peristiwa di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya kondisi sosial budaya masyarakat Bima selalu dalam keadaan terbuka bagi elite politik perempuan. Sekat-sekat kelompok tertentu yang menyatakan bahwa perempuan

tidak diperbolehkan untuk menjadi seorang pemimpin dengan sendirinya terbantahkan. Peristiwa di atas, juga menggambarkan bahwa partai Golkar sebagai sarana rekrutmen politik memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender khusus bagi perempuan, dimana menempatkan Hj. Indah Damayanti Putri, SE, sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar di Kabupaten Bima. Hal ini diasumsikan bahwa partai Golkar konsisten dalam memperhatikan peran dan partisipasi perempuan di panggung politik, dan mampu memanfaatkan dengan baik kondisi sosial budaya masyarakat Bima yang memiliki latar belakang kebiasaan, watak, kelas sosial, dan etnik yang beragam antara kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lain. Berdasarkan pendeskripsian tersebut, maka fenomena ini menarik untuk diteliti lebih dalam dengan menggunakan metode-metode secara ilmiah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tindakan partai Golkar Kabupaten Bima merealisasikan tindakan kesetaraan gender melalui interkoneksi kondisi sosial budaya dalam rekrutmen politik? Dengan tujuan ingin mendeskripsikan tindakan partai Golkar Kabupaten Bima merealisasikan tindakan kesetaraan gender melalui interkoneksi dengan kondisi sosial budaya dalam rekrutmen politik. Manfaat teoritis, diharapkan dapat mengembangkan sekaligus dapat dijadikan sebagai referensi di bidang ilmu sosiologi politik melalui inter-koneksi (korelasi) kondisi sosial budaya partai politik merealisasikan kesetaraan gender khusus bagi perempuan di bidang politik. Sementara manfaat praktis, dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi partai politik bertindak melalui keterkaitannya dengan kondisi sosial budaya untuk memperhatikan keterwakilan perempuan di bidang politik serta merealisasikan peran dan partisipasi perempuan dalam kedudukan dan fungsi yang setara dengan laki-laki.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Demi melengkapi referensi, peneliti menguraikan beberapa penelitian terdahulu untuk memperkuat isi Tesis, yakni sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan (A. Putri Budiatri, 2012) yang diterbitkan dalam jurnal *Widyaiset*, Volume 15, No.1 April 2012 tentang “Peran

Partai Politik Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR dan DPRD)”. Penelitian ini menguraikan tentang bagaimana peran partai politik sebagai satu-satunya “kendaraan politik” yang secara formal diakui oleh undang-undang yang memiliki peran penting dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR RI dan DPRD. Hasil penelitian ini menemukan bahwa komitmen partai politik untuk merealisasikan kebijakan yang mengatur keterwakilan perempuan di parlemen masih rendah.

Kedua, penelitian yang dilakukan (Idris, 2014) yang diterbitkan dalam jurnal *Katalogis*, Volume 4, Nomor 3, Maret 2016 hlm 125-136, tentang “Partisipasi Politik Perempuan Di Partai Demokrat Pada Pemilihan Anggota Legislatif 2014 Kabupaten Parigi Moutong”. Penelitian ini menguraikan tentang bagaimana tingkat partisipasi politik perempuan di partai Demokrat pada pemilihan legislatif 2014 di Kabupaten Parigi Moutong, dengan menggunakan partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson yang terdiri dari partisipasi politik, kegiatan lobi, dan kegiatan organisasi.

Ketiga, penelitian (Elisabeth Anita Dhewy Haryono, 2014) yang diterbitkan melalui Jurnal Perempuan Volume 19, Nomor 2, Mei 2014: 153-160, tentang “Bagaimana Wajah Caleg Perempuan dalam Pemilu 2014”. Penelitian ini berupaya menganalisis dinamika Pemilu 2014 menunjukkan bahwa partai politik hanya mengadopsi kebijakan afirmatif pada level formal-legal. Ia melihat secara praktik, meskipun mereka telah menetapkan kuota minimal perempuan. Tetapi, tidak diikuti oleh kebijakan internal di dalam struktur partai politik untuk mendukung kepemimpinan perempuan di panggung politik.

Elisabeth menemukan dua faktor penghambat keterwakilan politik perempuan dalam penelitiannya, yaitu: (a) sikap partai politik pada caleg perempuan masih kurang diperhatikan. Karena kebijakan internal yang dibuat oleh parpol dalam proses seleksi pemilihan bakal calon, misalnya bagaimana parpol menempatkan perempuan di dapil-dapil potensial masih belum diatur dengan jelas. (b) sikap masyarakat pada caleg perempuan masih menggunakan standar ganda dalam menilai perempuan dan laki-laki. Artinya, keberpihakan

masyarakat untuk memilih caleg lebih didominasi oleh caleg laki-laki (budaya patriarkhi di lingkungan masyarakat).

Dari beberapa literatur terdahulu yang dikutip, ada posisi yang berbeda dengan Tesis ini yang menganalisis keterkaitan kondisi sosial budaya terhadap peningkatan partisipasi politik perempuan dan mengkorelasikannya dengan kinerja partai politik sebagai kendaraan politik untuk merealisasikan tindakan kesetaraan gender dalam dunia politik di Kabupaten Bima. Keterkaitan yang dianalisis dari dua pendekatan yaitu pendekatan historis dan kekinian.

Dua pendekatan yang dimaksud menjelaskan berkaitan dengan penghambat perempuan berperan dan berpartisipasi sebagai makhluk sosial dan berkaitan dengan perubahan cara berfikir perempuan ke arah yang lebih maju terkait pentingnya peran dan partisipasi mereka diberbagai sector pembanguna. Sehingga mampu menciptakan sebuah fenomena baru dan menciptakan sejarah pertama di Kabupaten Bima, dimana sosok perempuan yang diusung oleh partai Golkar memenangkan Pilkada serentak tahun 2016 di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Sttudi ini diangkat dengan judul “Inter-konektif Sosial Budaya Partai Politik Merealisasikan Tindakan Kesetaraan Gender (Studi Pada Partai Golongan Karya di Kabupaten Bima).

Pengarusutamaan Gender di Indonesia

Salah satu pembangunan nasional adalah pembangunan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam UUD 1945 pasal 27 dinyatakan bahwa adanya jaminan kesamaan hak bagi seluruh warga negara, baik laki-laki maupun perempuan termasuk anak-anak di depan hukum. Upaya peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan telah tersirat dalam lima falsafah dasar bangsa Indonesia yaitu Pancasila Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pancasila sebagai cara dan falsafah hidup bangsa Indoensia, tidak membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai status, hak, dan kewajiban, serta kesempatan yang sama di dalam keluarga dan masyarakat.

Dalam Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, bertujuan untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki

Indonesia dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan serta meningkatkan partisipasi dalam penguasaan terhadap proses pembangunan. INPRES ini merupakan momentum bagi kemajuan perempuan dan meningkatkan kesetaraan gender, yang diperluas hingga mencakup perencanaan dan penganggaran yang inklusif gender.

Human Development Report (HDR) tahun 2010, sebelumnya melaporkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia menempati peringkat 108 dari 182 negara. Pada tahun 2015 *Human Development Report* (HDR) melaporkan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia menempati peringkat 105 dari 159 negara, dengan nilai IPM untuk perempuan di Indonesia sebesar 0,660, sementara laki-laki 0,712, yang memberikan nilai IPG 0,926 untuk Indonesia, dimana nilai IPM berarti memberikan kesetaraan pembangunan yang penuh antara perempuan dan laki-laki. Nilai ini menunjukkan tingkat kesetaraan pembangunan gender di Indonesia masih di bawah rata-rata kesetaraan di Asia Timur dan Pasifik, yang nilai IPM rata-ratanya 0,956, (Indonesia, n.d.). Ada peningkatan konsisten dari IPG di Indonesia tetapi masih menghadapi tantangan dalam mencapai semua indikator utama kesetaraan gender.

Usaha mewujudkan pengarusutamaan gender yang sesuai dengan ketentuan peraturan formal melalui UUD Tahun 1945 dan INPRES No 9 Tahun 2000 serta peraturan lainnya masih terkandala untuk mencapai pada indikator utama yakni kesetaraan gender bagi perempuan dan laki-laki. Hal demikian disebabkan kurang-pahaman yang mendasar tentang manfaat dan pentingnya pengarusutamaan gender. Untuk itu sangat diperlukan pemahaman dari beberapa konsep yang akan diuraikan, yaitu: Tujuan Pengarusutamaan Gender (PUG), Konsep Gender dan Jenis Kelamin, Konsep Keadilan dan Kesetaraan, Problem Ketidaksetaraan Gender, dan Pentingnya Keterwakilan dan Partisipasi Perempuan Dalam Politik.

Tujuan Pengarusutamaan Gender

Dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, bertujuan untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki Indonesia dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan serta meningkatkan partisipasi dalam penguasaan terhadap proses pembangunan.

INPRES ini merupakan momentum bagi kemajuan perempuan dan meningkatkan kesetaraan gender, yang diperluas hingga mencakup perencanaan dan penganggaran yang inklusif gender.

Human Development Report (HDR) tahun 2010, sebelumnya melaporkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia menempati peringkat 108 dari 182 negara. Pada tahun 2015 *Human Development Report* (HDR) melaporkan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia menempati peringkat 105 dari 159 negara, dengan nilai IPM untuk perempuan di Indonesia sebesar 0,660, sementara laki-laki 0,712, yang memberikan nilai IPG 0,926 untuk Indonesia, dimana nilai IPM berarti memberikan kesetaraan pembangunan yang penuh antara perempuan dan laki-laki. Nilai ini menunjukkan tingkat kesetaraan pembangunan gender di Indonesia masih di bawah rata-rata kesetaraan di Asia Timur dan Pasifik, yang nilai IPM rata-ratanya 0,956, (Indonesia, n.d.). Ada peningkatan konsisten dari IPG di Indonesia tetapi masih menghadapi tantangan dalam mencapai semua indikator utama kesetaraan gender.

Usaha mewujudkan pengarusutamaan gender yang sesuai dengan ketentuan peraturan formal melalui UUD Tahun 1945 dan INPRES No 9 Tahun 2000 serta peraturan lainnya masih terkandala untuk mencapai pada indikator utama yakni kesetaraan gender bagi perempuan dan laki-laki. Hal demikian disebabkan kurang-pahaman yang mendasar tentang manfaat dan pentingnya pengarusutamaan gender. Untuk itu sangat diperlukan pemahaman dari beberapa konsep yang akan diuraikan, yaitu: Tujuan Pengarusutamaan Gender (PUG), Konsep Gender dan Jenis Kelamin, Konsep Keadilan dan Kesetaraan, Problem Ketidaksetaraan Gender, dan Pentingnya Keterwakilan dan Partisipasi Perempuan Dalam Politik.

Konsep Gender dan Jenis Kelamin

Istilah “*gender*” pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (Rahayu, 2016) untuk memisahkan pencirian manusia didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis.

Ann Oakley dalam Nugroho, (2008: 3) mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh

kebudayaan manusia. Gender merupakan perbedaan perilaku (*behavioral differences*) antara ia laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yaitu perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan kultural yang panjang.

Menurut Intruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2000, gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah akibat oleh keadaan sosial budaya masyarakat.

Pada hakikatnya gender tidak bersifat universal namun bervariasi dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain dari waktu ke waktu. Sekalipun bervariasi, ada dua elemen gender yang bersifat universal menurut Gallery Nugroho (2008: 6), yaitu:

1. Gender tidak identik dengan jenis kelamin
2. Gender merupakan dasar dari pembagian kerja di semua masyarakat

Gender dan jenis kelamin dapat disimpulkan, gender adalah suatu konstruksi atau bentuk sosial yang sebenarnya bukan bawaan lahir sehingga dapat dibentuk atau diubah tergantung dari tempat, waktu atau zaman, suku, ras, budaya, status sosial, pemahaman agama, politik, hukum, dan ekonomi. Sedangkan jenis kelamin adalah ciptaan Tuhan merupakan suatu kodrat yang tidak dapat diubah juga tidak dapat dipertukarkan, sehingga berlaku sepanjang zaman dan dimana saja.

Konsep Keadilan dan Kesetaraan

Keadilan Gender (*Gender Equity*) menurut Fakiha, (2008: 12) suatu kondisi atau perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki. Agar perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki dapat diwujudkan, maka diperlukan langkah-langkah untuk memutuskan hal-hal yang secara psikis, politik dan sosial budaya yang memperhambat perempuan dan laki-laki untuk bisa berperan dan menikmati hasil dari perannya tersebut.

Keadilan gender merupakan suatu kondisi yang adil bagi perempuan dan laki-laki melalui suatu proses kultural dan struktural yang menghentikan hambatan-hambatan aktualisasi bagi pihak-pihak yang oleh karena jenis kelaminnya mengalami hambatan, baik secara kultural maupun secara struktural (Tridewiyanti, 2012).

United States Agency for International Development (USAID) menyebutkan bahwa keadilan gender merupakan suatu proses menjadi fair baik pada perempuan maupun laki-laki. Untuk memastikan adanya fair, harus tersedia ukuran untuk mengompensasi kerugian secara historis maupun sosial yang mencegah perempuan dan laki-laki berlakunya suatu tahapan permainan. Strategi keadilan gender pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Keadilan merupakan cara, kesetaraan adalah hasilnya (Puspitawati^r, 2013).

Kesetaraan Gender menurut *United States Agency for International Development (USAID)* (Puspitawati^r, 2013) memberi kesempatan baik pada perempuan dan laki-laki untuk secara setara/sama/sebanding menikmati hak-haknya sebagai manusia, secara sosial mempunyai benda-benda, kesempatan, sumberdaya dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan.

Mengikutip pendapat Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia (Aruni, 2018) menyatakan bahwa kesetaraan adalah kebersamaan, kasih sayang, penghormatan atas hak, pembelaan atas kezhaliman atas menimpa saudaranya serta senasib dan sepenideritaan.

Menurut Riant Nugroho (Aruni^l, 2018) menyatakan bahwa kesetaraan gender yaitu adanya kesamaan kondisi untuk laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan kesehatan serta dalam menikmati hasil pembangunan.

Kesetaraan gender (Tridewiyanti^r, 2012) adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Azza Karam (1999) menjelaskan ada dua konsep tentang kesetaraan yakni kesetaraan kompetitif dan kesetaraan hasil. Kesetaraan kompetitif ditunjukan untuk menyingkirkan hambatan-hambatan yang sifatnya formal, misalnya, memberikan perempuan hak suara. Selanjutnya, tergantung perempuan bagaimana mereka ingin memanfaatkan haknya tersebut. Sementara itu, dalam konsep kesetaraan hasil, kesetaraan bukan hanya disingkirkannya hambatan-hambatan

formal, tetapi ditetapkan suatu mekanisme yang positif seperti kuota untuk mencapai hasil yang setara pula (Latifah^u, 2011).

Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Keadilan dan kesetaraan gender juga berarti tidak ada pembekuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Permasalahan Ketidaksetaraan Gender

Ketertinggalan perempuan mencerminkan masih ada ketidaadilan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan secara umum di Indonesia, hal ini terlihat dari gambaran kondisi perempuan di Indonesia. Perbedaan gender dan pemilihan sifat, peran, dan posisi tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan. Namun, pada kenyataannya perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan yang bukan saja dihadapi perempuan, tetapi juga laki-laki.

Perbedaan peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab serta kedudukan juga dampak dari peraturan perundang-undangan maupun kebijakan telah telah menimbulkan berbagai ketidakadilan karena telah berakar dalam adat, norma ataupun struktur masyarakat. Sebab, gender masih diartikan oleh masyarakat termasuk partai politik (kendaraan politik) sebagai perbedaan jenis kelamin. Masyarakat bahkan partai politik belum memahami secara totalitas bahwa gender adalah suatu konstruksi budaya tentang peran fungsi dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan.

Kondisi demikian mengakibatkan kesenjangan peran sosial dan tanggung jawab sehingga terjadi diskriminasi, terhadap laki-laki dan perempuan. Hanya saja bila dibandingkan, diskriminasi terhadap perempuan kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki.

Faqih (2008) dalam (Rahayu, 2016) menyatakan, ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur yang menempatkan laki-laki maupun perempuan sebagai korban dari sistem tersebut.

Selanjutnya Achmad M. (Rahayu¹, 2016) menyatakan ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan terutama pada perempuan; misalnya marginalisasi, *subordinasi*, stereotipe/pelabelan negatif sekaligus perlakuan diskriminatif, kekerasan terhadap perempuan, beban kerja lebih banyak dan panjang. Manifestasi ketidakadilan gender tersebut masing-masing tidak bisa dipisahkan, saling terkait dan berpengaruh secara dialektis.

Arjuni, (2006) dalam (Made, Widayani, & Hartati, 2014) menyatakan budaya patriarkhi cenderung menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perlakuan yang kurang menguntungkan bagi kaum perempuan, seperti perlakuan diskriminatif. Selanjutnya Fakih (2005) (Made et al., 2014) menyatakan bahwa marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sudah di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. Menurut Yuasri perempuan memiliki lebih banyak aturan yang harus ditaati dan berarti juga perempuan lebih banyak melaksanakan tugas. Kondisi demikian yang membuat kedudukan laki-laki menjadi semakin lebih dominan, begitupun juga dalam jabatan secara politik.

Pentingnya Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik

Bermacam-macam definisi politik, namun kalau dilihat pendapat Rod Hague et al (Tridewiyanti, 2012) politik adalah kegiatan yang menyangkut bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya.

Mariam Budiardjo menyatakan bahwa unsur dalam politik yang diambil dari beberapa pendapat ahli ada lima yaitu: negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan (*policy, beleid*) dan pembagian kekuasaan (*distribution*) atau alokasi (*allocation*) (Tridewiyanti, 2012).

Di dalam bidang politik, penting keterlibatan semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan, terutama di lembaga Legislatif. Partisipasi dan keterwakilan perempuan di Legislatif, sebagai anggota legislatif sangat penting karena terkait dengan representasi politik. Anggota Legislatif merupakan representasi rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Oleh sebab itu,

seharusnya anggota legislatif yang berasal dari kader dari partai politik tertentu tidak hanya loyal pada parpol dan kebijakan parpol, tetapi juga loyal pada rakyatnya. Dengan demikian, wakil rakyat anggota parlemen terpilih seharusnya tidak hanya didasarkan pada kriteria statistic dan matematika, seperti yang berkembang selama ini dalam pemilu, tetapi juga dipilih lewat kriteria kepentingan dan aspirasi yang ada diberbagai kalangan dalam masyarakat, agar kepentingan minoritas seperti perempuan juga terlindungi dan mendapat tempat.

Untuk melindungi kepentingan kelompok minoritas atau perempuan di bidang politik. Maka kehadiran Tindakan Khusus Sementara atau Tindakan Afirmasi (*Affirmative Action*) dilakukan untuk mengejar ketertinggalan perempuan khususnya di bidang politik akibat adanya diskriminasi. Berdasarkan penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa, jumlah minimum 30 persen (tiga puluh per seratus) merupakan suatu *critical mass* untuk memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga public. Penetapan jumlah 30 persen seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 248 ayat 3 menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan pada tingkat pencalonan.

Selanjutnya tertuang dalam salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI Nomor 20 Tahun 2018 pada pasal 6 ayat 3 menegaskan bahwa partai politik yang tidak memenuhi pengajuan kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan tidak dapat diterima. Dengan demikian, maka keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam politik sudah disyahkan dalam peraturan secara formal oleh negara yang harus diperjuangkan serta diperhatikan oleh semua elemen baik warga negara maupun parpol sebagai kendaraan politik ketika pemilu.

Perspektif Teori

Dalam penelitian ini menggunakan Teori Tindakan Sosial yang dikemukakan Max Weber. Tindakan sosial Max Weber berorientasi pada tujuan. Dengan menggunakan teori ini kita dapat memahami perilaku setiap individu, yang memiliki tujuan terhadap sebuah tindakan yang dilakukannya.

Max Weber dalam Ritzer, (2014: 216) menggunakan metodologi tipe-idealnya untuk menjelaskan makna “tindakan” dengan memperkenalkan empat tipe dasar tindakan, yaitu:

a. Tindakan Rasional Tujuan

Tindakan ini dilakukan seseorang dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dengan tujuan yang akan dicapai. Tindakan “yang ditentukan oleh pengharapan mengenai perilaku objek di dalam lingkungan sebagai ‘kondisi’ atau ‘alat’ untuk pencapaian tujuan sang aktor sendiri yang dikejar dan diperhitungkan secara rasional”.

b. Tindakan Rasional Nilai

Tindakan ini bersifat rasional dan memperhitungkan manfaatnya, tetapi tujuan yang hendak dicapai tidak terlalu dipentingkan. Pelaku hanya beranggapan bahwa yang paling penting tindakan itu termasuk dalam kriteria baik dan benar menurut ukuran dan penilaian masyarakat disekitarnya. Tindakan “yang ditentukan oleh kepercayaan yang sadar akan nilai tersendiri suatu bentuk perilaku yang etis, estetis, religius, atau bentuk lainnya, terlepas dari prospek keberhasilannya”.

c. Tindakan Afektual

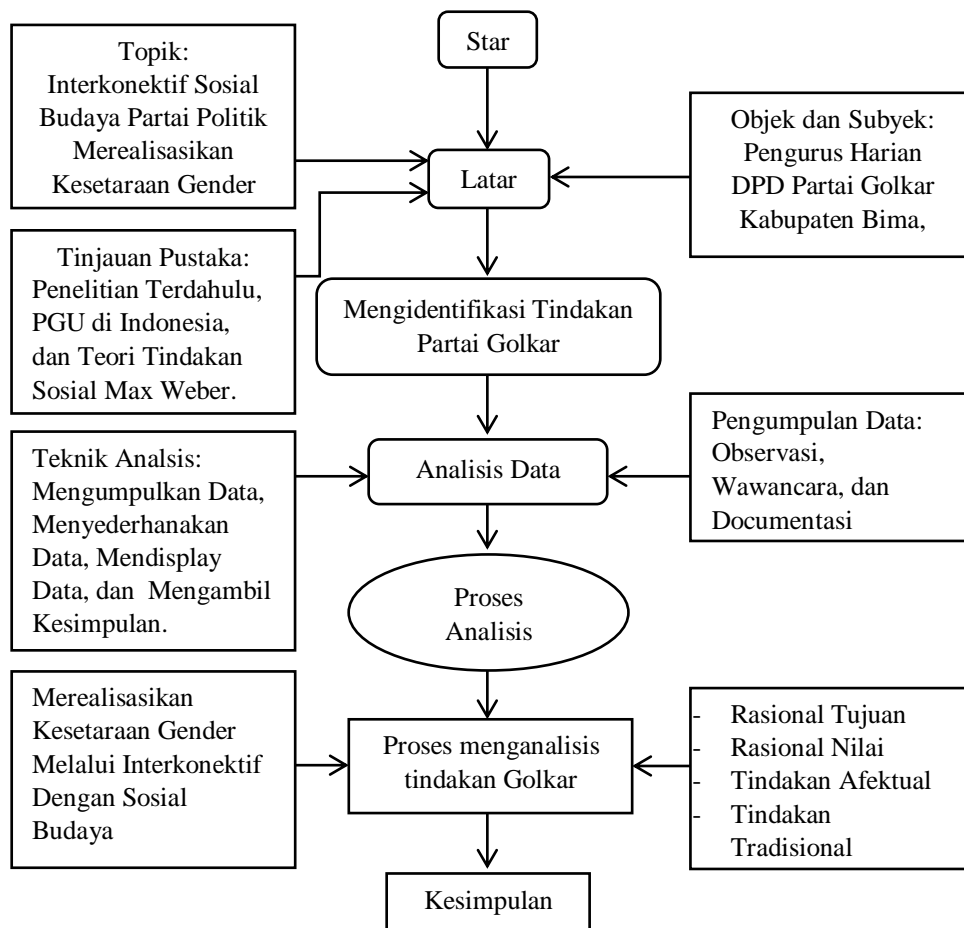
Tindakan ini sebagian besar dikuasai oleh perasaan atau emosi tanpa pertimbangan akal budi. Seringkali tindakan ini dilakukan tanpa pencernaan matang tanpa kesadaran penuh. Jadi dapat dikatakan sebagai reaksi spontan atas suatu peristiwa. Tindakan “yang ditentukan oleh kondisi atau keadaan emosional sang aktor”.

d. Tindakan Tradisional

Tindakan ini merupakan tindakan yang tidak rasional karena berorientasi pada tradisi masa lampau. Seorang melakukan tindakan hanya karena kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, tanpa menyadari alasan atau membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai tujuan dan cara yang akan digunakan. Tindakan “yang ditentukan oleh cara-cara berperilaku sang aktor yang biasa dan lazim dilakukan”.

Dari keempat tipe dasar tindakan sosial yang dijelaskan Max Weber di atas digunakan oleh peneliti untuk mengidentifikasi terkait tindakan partai Golkar Kabupaten Bima merealisasikan tindakan kesetaraan gender melalui interkoneksi dengan kondisi sosial budaya dalam proses rekrutmen politik baik rekrutmen dalam hal pencalonan maupun menjadi pengurus partai. Selain dijadikan sebagai alat identifikasi teori ini juga digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan tentang bagaimana partai Golkar Kabupaten Bima merealisasikan tindakan kesetaraan gender melalui korelasinya dengan kondisi sosial budaya yang berlaku di masyarakat Kabupaten Bima dalam hal menjalankan rekrutmen politiknya.

Kerangka Berpikir



Gambar 1.2 Kerangka Berfikir Penelitian

Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah penelitian dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga penelitian

tersebut benar-benar mendapatkan hasil yang diinginkan. Disamping itu fokus penelitian juga merupakan batas ruang dalam pengembangan penelitian supaya penelitian yang dilakukan tidak terlaksana dengan sia-sia karena ketidakjelasan dalam pengembangan dan pembahasan.

Dengan demikian fokus dari penelitian ini adalah membahas bagaimana partai Golkar Kabupaten Bima merealisasikan tindakan kesetaraan gender melalui interkoneksi kondisi sosial budaya dalam menjalankan mekanisme rekrutmen politik. Untuk mencapai pada tujuan penelitian ini, peneliti menempatkan interkoneksi sosial budaya, rekrutmen politik partai politik, dan tindakan kesetaraan gender sebagai kunci untuk mengupas setiap aktivitas yang dilakukan oleh partai Golkar Kabupaten Bima.

METODE PENELITIAN

Paradigma Sosiologi

Kedudukan paradigma membantu untuk merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang musti di jawab, bagaimana seharusnya menjawabnya, serta aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan yang diteliti dan dianalisis Ritzer, (2018: 8).

Maka keberadaan paradigma menjadi sesuatu yang penting. Dengan demikian, paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial merupakan paradigma yang memusatkan perhatian pada tingkatan, interaksi, dan konstruksi sosial dari sebuah realitas sosial. Seperti realitas dari fenomena menarik yang terjadi di Kabupaten Bima saat ini, dimana salah satu partai politik khususnya partai Golkar menempatkan perempuan yakni Hj. Indah Damayanti Putri, SE sebagai ketua partai dan sekaligus meloloskannya menjadi Kepala Daerah di Kabupaten Bima. Keberhasilan tersebut disamping pengaruh dari tindakan partai Golkar yang tepat dan strategis, juga ada pengaruhnya dengan trik rekor Umi dinda yang merupakan perempuan dari keluarga Istana Bima yang secara sosial budaya memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat Kabupaten Bima.

Exemplar dari paradigma ini adalah salah satu aspek yang sangat khusus dari karya Weber, yakni dalam analisisnya tentang tindakan sosial. Paradigma

definisi sosial bermula pada asumsi bahwa manusia mempunyai kemampuan yang kreatif, inovatif dan daya selektif yang kuat, sehingga apa yang diperbuat bersumber dari dalam dirinya Ritzer, (2018: 43).

Paradigma ini peneliti gunakan untuk memahami atau menafsirkan tindakan sosial sekelompok individu yang berkecimpun dalam partai Golkar di Kabupaten Bima. Dengan pertanyaan penelitian yakni bagaimana tindakan partai Golkar Kabupaten Bima merealisasikan tindakan kesetaraan gender melalui interkonektifnya dengan kondisi sosial budaya dalam menjalankan mekanisme rekrutmen politik.

Pendekatan Penelitian, Jenis dan Subyek Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang diteliti, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Rusidi (1991) penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya sesuatu aspek fenomena sosial tertentu, dan untuk mendeskripsikan fenomena tertentu secara terperinci Suryana, (2010: 20). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif jenis naturalistic. Istilah lain yang digunakan dengan makna penelitian kualitatif adalah penelitian naturalistic. Subyek penelitian yaitu pengurus harian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Golkar Kabupaten Bima, yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut: *pertama*, menjabat sebagai ketua DPD partai Golkar; *kedua*, kader yang menjabat sekretaris DPD partai Golkar; *ketiga*, kader yang menjabat wakil sekretaris DPD partai Golkar; *keempat*, kader yang pernah menjabat ketua atau wakil ketua bidang pengurus DPD partai Golkar; dan *kelima*, kader yang pernah mengikuti sebagai calon anggota legislatif merupakan perwakilan dari partai Golkar.

Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian dan sumber data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merujuk seperti yang dijelaskan oleh Creswell (2017: 224-225) sebagai berikut: (1) Observasi, (2) Wawancara, dan (3) dokumentasi.

Teknik Analisis Data dan Uji Keabsahan Data

Machmud (2016: 74) analisis data merupakan sebuah aktivitas mendalam antara temuan data di lapangan dengan basis teoritik yang digunakan, sehingga dapat ditata secara sistematis. Jadi analisis data dalam penelitian ini seperti yang dijelaskan Miles, Huberman dan Saldana (2014: 31-33) menggambarkan komponen analisis data harus melewati tahap-tahap berikut: (1) Data Terkumpul, (2) Data Kondensasi, (3) Data Display, dan (4) Kesimpulan (*Conclusion*). Proses pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini peneliti melakukan interpretasi data yang ditemukan dari hasil data yang ditemukan di lapangan yang dideskripsikan secara teoritis tentang tindakan sosial partai Golkar Kabupaten Bima merealisasikan tindakan kesetaraan gender melalui interkoneksi dengan kondisi sosial budaya dalam rekrutmen politik. Hasil penelitian ini dideskripsikan dengan menggunakan teori tindakan sosial Max Weber yang mengemukakan empat tipe tindakan sosial baik secara individu maupun kelompok, yaitu: *pertama*, tindakan rasional tujuan, *kedua*, tindakan rasional nilai, *ketiga*, tindakan afektual, dan *keempat*, tindakan tradisional.

Teori tindakan sosial dibangun oleh beberapa unsur diantaranya: actor dan pergerakan. Actor dalam penelitian ini adalah suatu individu yang bergabung dalam partai Golkar di Kabupaten Bima. Pergerakannya merealisasikan tindakan kesetaraan gender melalui interkoneksi dengan kondisi sosial budaya dalam rekrutmen politik. Dengan menggunakan teori ini kita dapat memahami perilaku atau tindakan individu maupun kelompok seperti partai Golkar yang pastinya memiliki motif dan tujuan yang berbeda terhadap sebuah tindakan yang dilakukan.

Pada intinya setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud mendapatkan tujuan tertentu dinamakan tindakan sosial. Tindakan sosial sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Manusia mempunyai naluri untuk hidup bersama dengan manusia lain, begitupun individu-individu yang terhimpun

di dalam partai Golkar pastinya mempunyai tujuan untuk hidup bersama dengan simpatisan masyarakat. Artinya, partai politik khusus Golkar bersama dengan aktornya di dalam, tidak bisa berkembang tanpa adanya bantuan masyarakat disekitarnya.

Berdasarkan data temuan di lapangan melalui hasil wawancara, observasi dan analisis document oleh peneliti, ditemukan hanya ada dua tipe tindakan yang dilakukan oleh pengurus harian DPD partai Golkar di Kabupaten Bima. Untuk mengetahui kedua tipe tindakan sosial partai Golkar di Kabupaten Bima, dapat dilihat dari penjelasan berikut:

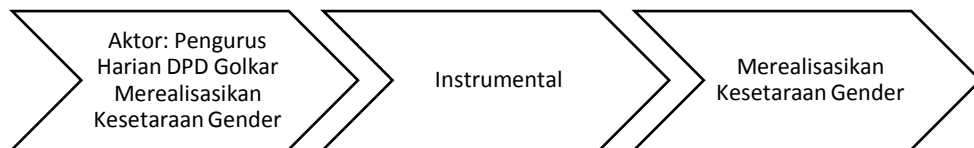
1. Tindakan Rasional Tujuan

Tindakan ini ditentukan oleh pengharapan-pengharapan mengenai perilaku aktor di dalam lingkungan dan perilaku manusia lainnya. Pengharapan-pengharapan itu digunakan sebagai kondisi-kondisi atau alat-alat untuk pencapaian tujuan-tujuan sang aktor sendiri yang dikejar dan diperhitungkan secara rasional.

Dalam penelitian ini pergerakan pengurus partai Golkar Kabupaten Bima merealisasikan tindakan kesetaraan gender melalui interkoneksi dengan kondisi sosial budaya dalam rekrutmen politik yakni tergambarkan pada lima aspek tindakan sosial yang dilakukan, yakni sebagai berikut: *pertama*, melakukan pemetaan kondisi sosial budaya masyarakat diberbagai dapil serta mempelajarinya dengan baik; *kedua*, menyalurkan bantuan sosial dan mengadakan kegiatan bernuansa sosial budaya sesuai dengan budaya masyarakat Bima; *ketiga*, penempatan figure public dari kalangan Istana yakni Hj. Indah Damayanti Putri, SE untuk menempati posisi strategis sebagai ketua partai; *keempat*, menjadikan organisasi sayap seperti organisasi Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), dan Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) sebagai wadah untuk meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dan laki-laki di bidang politik.

Empat bentuk tindakan sosial di atas, merupakan alat bagi pengurus harian DPD partai Golkar untuk mencapai pada tujuan yang diinginkan yakni untuk menciptakan peran dan partisipasi perempuan yang lebih massif di

bidang politik atau menciptakan peran, kedudukan, dan fungsi perempuan yang setara dengan laki-laki pada level menjadi pengurus partai. Seperti yang dijelaskan Jhonson (2005) dalam (Nurpadilah, 2013) bahwa individu maupun kelompok terlebih dahulu menilai alat yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan yang dipilihnya. Tindakan instrumental pengurus DPD partai Golkar Kabupaten Bima merealisasikan kesetaraan gender dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.3 Diagram Tindakan Instrumental Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Bima Merealisasikan Kesetaraan Gender

Tetapi berdasarkan observasi dan analisis dari sikap serta perilaku dari subyek penelitian terkait kelima tindakan sosial yang dilakukan di atas, peneliti menafsirkan bahwa statetmen mereka yang merealisaikan kesetaraan gender melalui keterkaitan dengan kondisi sosial budaya masyarakat hanya sebatas sebuah distorsi bahasa, karena peneliti melihat tindakan tersebut lebih pada orientasi mereka yang ingin meraih kekuasaan secara politik dari tiga tujuan berikut:

a. Meraih suara simpatisan masyarakat

Dalam meraih suara simpatisan masyarakat melalui hasil pemilihan umum baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Partai politik harus menjadikan agenda penting untuk mengayomi kepentingan atau aspirasi masyarakat pada umumnya. Dalam tindakan ini banyak alasan yang dijelaskan oleh pengurus harian partai Golkar Kabupaten Bima, yang mengarah pada tindakannya yang ingin meraih atau menarik perhatian masyarakat Kabupaten Bima yang memiliki hubungan dengan kondisi sosial budaya dalam rekrutmen, salah satunya seperti yang diungkapkan oleh subyek berikut ini kepada peneliti:

“Pastinya partai Golkar memiliki keterkaitan dengan kondisi sosial budaya yang berlaku di masyarakat Bima, masyarakat yang kental dan masih kuat kepercayaannya terhadap nilai agama, nilai sosial, dan nilai budaya. Korelasi antara keduanya seperti yang sudah saya jelaskan dari awal tadi adinda, pada proses rekrutmen politik

kami di partai Golkar benar-benar menyeleksi dan melihat tentang trik rekor kader yang tidak bertentangan dengan nilai sosial budaya di masyarakat, misalnya, seperti kefiguran, pendekatan sosialnya, kejujuran, sikapnya yang amanah, dan komunikasi yang baik dengan masyarakat.” (Dafullah, M.Si)

Meyer (2012) dalam laporan akhir tentang “Tinjauan Peran Partai Politik Dalam Demokrasi di Indonesia” (2016: 9) partai politik memiliki peran sentral yang mencakup dua dimensi dalam meraih fother. Kedua dimensi ini adalah: *pertama*, partai politik mengagregasikan kepentingan dan aspirasi masyarakat lalu mengtransformasikannya menjadi agenda yang akan membentuk platform dalam pemilu. Platform ini harus bisa menarik minat dan kepercayaan orang banyak agar partai mendapat kursi banyak diparlemen untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan. *Kedua*, partai politik merupakan satu-satunya pihak yang dapat menterjemahkan kepentingan dan nilai-nilai masyarakat ke dalam legislasi dan kebijakan publik yang mengikat.

b. Meningkatkan Elektabilitas Kepartaian

Menurut Dandy Sugiono, (2008) menjelaskan elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pemilihan. Elektabilitas bisa diterapkan kepada barang, jasa, maupun orang badan atau partai. Elektabilitas biasanya dibicarakan pada saat pemilihan umum. Elektabalitas partai tinggi berarti partai tersebut memiliki daya pilih yang tinggi. Untuk meningkatkan elektabilitas maka sangat tergantung pada teknik kampanye yang diterapkan oleh partai politik. (lihat: <http://www.maxmanroe.com>)

Dalam penelitian ini tindakan partai Golkar Kabupaten Bima yang seharusnya merealisasikan tindakan kesetaraan gender malah dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan elektabilitas dan distabilitas Golkar secara kepartaian.

Berdasarkan analisis peneliti terhadap hasil percakapan dengan subyek penelitian yakni pengurus partai Golkar dalam sajian data di atas, banyak tindakan rasional instrumental yang diperhitungkan oleh mereka untuk mencapai pada tujuan yang meningkatkan elektabilitas melalui daya

pilih yang tinggi yaitu: *pertama*, melakukan pemetaan kondisi sosial budaya masyarakat diberbagai dapil serta mempelajarinya dengan baik; *kedua*, menyalurkan bantuan sosial dan mengadakan kegiatan bernuansa sosial budaya sesuai dengan budaya masyarakat Bima; *ketiga*, penempatan figure public dari kalangan Istana yakni Hj. Indah Damayanti Putri, SE untuk menempati posisi strategis sebagai ketua partai; *keempat*, menjadikan organisasi sayap seperti organisasi Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), dan Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) sebagai wadah untuk meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dan laki-laki di bidang politik.

c. Mempertahankan Kekuasaan

Dalam mempertahankan kekuasaan politik, partai politik perlu merencanakan strategi politik, tanpa adanya strategi politik perubahan jangka panjang sama sekali tidak akan dapat diwujudkan. Peter Schroder (Muhammad Ali dkk) menekankan, untuk melihat strategi politik pada 3 fase yakni Analisa Situasi, Keputusan Strategis, Implementasi Strategis.

Dalam penelitian pergerakan pengurus partai Golkar yang merealisasikan tindakan kesetaraan gender melalui keterkaitan dengan kondisi sosial budaya dalam rekrutmen politik artau penempatan jabatan politik, justru peneliti melihat dan berdasarkan analisis document dalam surat keputusan DPD partai Golkar masih mengadung tindakan yang kurang pro terhadap perempuan atau tidak ditransformasikan untuk meningkatkan peran dan partisipasi politik perempuan, tetapi justru keberadaan perempuan sebagai ketua dinilai sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan politik partai Golkar di Kabupaten Bima.

Berdasarkan hasil analisis dari wawancara dan pengamatan peneliti terkait tindakan partai Golkar yang ingin mempertahankan kekuasaan politik di pemerintahan Kabupaten Bima terlihat pada tindakan partai Golkar yang memperhatikan serta menjalankan ketiga fase strategi seperti yang dijelaskan oleh Peter Schroder yakni menganalisa situasi situasi sosial budaya yang berlaku di tengah masyarakat Bima yang cukup fanatic

terhadap keturunan dan keluarga Istana sampai sekarang, dan mengimplementasikan strategi tersebut tergambar dalam tindakan partai Golkar yang menempatkan Hj. Indah Damayanti Putri, SE, sebagai ketua DPD partai Golkar saat ini.

Dari kelima tindakan tindakan sosial yang dilakukan pengurus harian DPD partai Golkar Kabupaten Bima merealisasikan kesetaraan gender melalui keterkaitan dengan kondisi sosial budaya dalam rekrutmen termasuk dalam tipe tindakan rasional tujuan. Tetapi yang lebih mendominasi dalam tujuan mereka adalah ingin meraih suara simpatisan masyarakat, meningkatkan elektabilitas partai Golkar, dan mempertahankan kekuasaan (*power*) secara politik di daerah Kabupaten Bima.

2. Tindakan Rasional Nilai

Tindakan rasional nilai merupakan tindakan sadar dan masih rasional yang ditentukan oleh kepercayaan atas nilai tersendiri, dimana berupa perilaku yang etis religious, estetik ataupun bentuk lainnya yang terlepas dari prospek keberhasilannya.

Keberadaan partai Golkar di tengah kehidupan masyarakat Kabupaten Bima memiliki korelasi dengan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat yang juga ditempatkan sebagai pedoman bagi aktor-aktor politik di partai Golkar. Secara tidak langsung sadar tidak sadar individu-individu yang berkecimpun dalam partai Golkar terikat oleh nilai-nilai yang berlaku, dimana nilai-nilai itu sendiri pada dasarnya sudah ada. Tinggal, individu maupun kelompok hanya memperhitungkan cara untuk menjalankannya.

Nilai yang dikonstruksi sehingga mempengaruhi tindakan para aktor atau pengurus harian partai Golkar memiliki keterkaitan dengan situasi dan kondisi sosial budaya masyarakat Kabupaten Bima yang masih memegang teguh filosofi hidup "*maja labo dahu*", artinya malu dan takut ketika berbuat menyimpang. Filosofi ini diinterpretasikan juga sebagai dasar penilaian bagi pengurus harian DPD partai Golkar Kabupaten Bima sebagai rujukan untuk bertindak dalam mempersiapkan kader-kader yang

berkompetisi di dunia perpolitikan di daerah Kabupaten Bima. Tindakan pengurus DPD partai Golkar Kabupaten Bima menempatkan nilai sosial budaya sebagai pedoman untuk merealisasikan kesetaraan gender adalah sebagai berikut:

a. Nilai Sosial

Pengertian nilai sosial secara umum, merupakan konsep abstrak yang diyakini individu dan kelompok masyarakat dan memandu tindakan sosialnya. Abstrak berarti tak terlihat. Namun demikian ada dan dapat tercermin dari perilaku individu atau kelompok yang menganut nilai. Contoh, orang yang memberi uang kepada yang membutuhkan, berarti dia meyakini bahwa menolong orang miskin adalah suatu kebaikan.

Menurut Joesoef (1996) dalam Hasanuddin, (2017: 2) *nilai* itu meliputi: (1) sesuatu yang berbentuk atau berwujud dan dapat disentuh (*tangible*) yang dalam istilah lainnya dapat disebut sebagai benda budaya seperti bangunan (bersejarah) karya seni dan benda budaya lainnya; (2) sesuatu yang tidak berbentuk dan tidak dapat disentuh (*intangible*) seperti adat istiadat, tradisi, kebiasaan normative, moral, etika, semangat ilmiah, ilmu pengetahuan, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini terkait tindakan aktor-aktor politik di partai Golkar merealisasikan kesetaraan gender, mereka lebih kepada tindakan yang sadar akan korelasinya dengan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat, dimana mereka memikirkan bahwa apapun menjadi aktivitas mereka khusus dalam pelaksanaan rekrutmen politik tidak terlepas dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai yang sudah berlaku di lingkungan hidup masyarakat Kabupaten Bima.

Tindakan sekelompok aktor diinternal partai Golkar Kabupaten Bima yang berorientasi pada nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat yakni menempatkan nilai sosial sebagai syarat utama untuk terkafer menjadi kader serta sebagai penentuan awal dalam menempatkan kader yang orientasinya merealisasikan tindakan kesetaraan gender di struktur pengurus partai Golkar. Dimana nilai

tersebut yang dimaksud, seperti tingkat pendidikan, status sosial, pengaruh, dan kualitas kecakapan politik sebagai dasar untuk merekrut laki-laki dan perempuan baik sebagai caleg maupun sebagai pengurus partai Golkar. Sebagaimana percakapan Ir. Suryadin berikut ini kepada peneliti:

“Jelas sekali adinda, seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa nilai sosial seperti tingkat pendidikan, status sosial, pengaruh, kualitas kecakapan politik, dan kematangan finansial sebagai alat untuk merealisasikan tindakan kesetaraan gender. Disampin itu juga sebagai bukti keterkaitan partai Golkar dengan kondisi sosial budaya di masyarakat Kabupaten Bima. (Ir. Suryadin)

Ir. Suryadin menceritakan hal itu dengan sadar dan meyakinkan bahwa nilai sosial merupakan satu aspek penting untuk dilihat oleh mereka dalam menjalankan rekrutmen baik sebagai Caleg maupun sebagai kader partai. Sama dengan M. Iptidaiyah, SE., MM yang menceritakan bahwa aspek nilai sosial itu penting untuk diterapkan oleh partai politik khususnya partai Golkar dalam menjalankan rekrutmen politik. Ia menceritakan sebagai berikut:

“Tentu variable nilai sosial seperti prestasi, kecakapan serta kedekatan mereka di tengah masyarakat, ini penting bagi kami di partai Golkar dalam hal merekrut laki-laki dan perempuan sebagai kader. Ini merupakan indicator yang penting untuk melahirkan politisi Golkar yang memiliki etika dan estetika yang baik di tengah masyarakat Kabupaten Bima.” (M. Iptidaiyah, SE., MM)

b. Nilai Budaya

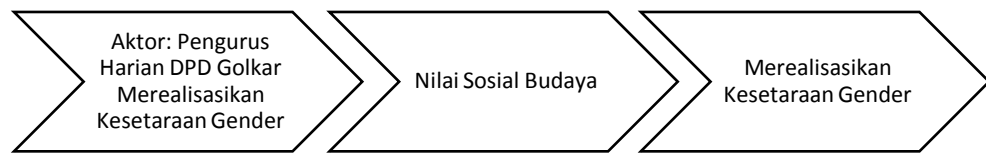
Menurut Koentjaraningrat (1987) dalam (Resti Dwi Jayanti, 2014) nilai budaya adalah terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam fikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap mulia. System nilai yang ada dalam suatu masyarakat dijadikan orientasi dan rujukan dalam bertindak. Oleh karena itu, nilai budaya yang dimiliki seseorang mempengaruhinya dalam menentukan alternative, cara-cara, alat-alat, dan tujuan-tujuan pembuatan yang tersedia.

Dalam penelitian ini tindakan sosial pengurus harian partai Golkar Kabupaten Bima merealisasikan tindakan kesetaraan gender dalam menjalankan rekrutmen politik melalui interkoneksi kondisi sosial budaya tergambar pada penempatan nilai budaya yang mereka jadikan sebagai alat yang melahirkan konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran mereka yang membentuk seseorang menjadi pribadi yang etis ataupun bentuk perilaku baik lainnya.

Tindakan partai Golkar yang berorientasi pada nilai budaya untuk merealisasikan kesetaraan gender yang membentuk perilaku seseorang yang bernilai etis serta berkeperibadian estetik di tengah kehidupan masyarakat Kabupaten Bima, sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu subyek penelitian Ismawarni, SP berikut ini kepada peneliti:

“Tentu saja mas seperti yang saya katakan tadi, partai Golkar menerapkan rekrutmen politik memperhatikan perilaku yang tertanam dalam diri orang yang direkrut sesuai dengan nilai budaya yang berlaku. Nilai budaya yang dimaksud adalah seperti kejujuran, religious, dan perilaku amanah yang dilihat dari rekam jejak kader dan orang yang mau direkrut sebagai kader.” (Ismawarni, SP)

Tindakan sosial pengurus harian partai Golkar dalam merealisasikan tindakan kesetaraan gender termasuk dalam tipe tindakan rasional nilai. Dimana tindakan yang dilakukan pengurus DPD partai Golkar Kabupaten Bima memiliki kesadaran akan pentingnya menempatkan nilai sosial budaya seperti tingkat pendidikan, status sosial, kecakapan, dan kedekatan di tengah masyarakat, kejujuran, dan rasa amanah dalam merekrut laki-laki dan perempuan menjadi calon maupun kader serta merealisasikan tindakan yang menciptakan peran dan partisipasi yang setara bagi kaum perempuan dan laki-laki di partai Golkar Kabupaten Bima. Tindakan rasional nilai pengurus harian DPD partai Golkar Kabupaten Bima merealisasikan kesetaraan gender dalam rekrutmen politik dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.4 Diagram Tindakan Rasional Nilai Pengurus Harian DPD Partai Golkar Kabupaten Bima Merealisasikan Kesetaraan Gender.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data tentang tindakan sosial partai Golkar Kabupaten Bima merealisasikan kesetaraan gender melalui interkoneksi dengan kondisi sosial budaya dalam rekrutmen politik dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Tindakan Instrumental pengurus harian DPD partai Golkar Kabupaten Bima merealisasikan kesetaraan gender melalui keterkaitan dengan kondisi sosial budaya dilakukan atas pertimbangan secara rasional. Yakni menempatkan figure perempuan sebagai ketua partai, menyalurkan bantuan sosial dan mengadakan kegiatan sosial budaya. Selain itu juga dipertimbangkan cara atau strategi yang dianggap efektif dalam mencapai tujuan untuk merealisasikan kesetaraan gender yakni menjadikan organisasi sayap sebagai wadah untuk menyeleksi dan meningkatkan peran dan partisipasi perempuan, mempelajari dengan baik sekaligus memetakan kondisi sosial budaya diberbagai dapil, dan membentuk tim survey untuk memperhatikan rekam jejak perempuan dan laki-laki.
- b. Tindakan Rasional Nilai. Tindakan pengurus harian DPD partai Golkar Kabupaten Bima merealisasikan tindakan kesetaraan gender yang berorientasi pada rasional nilai tampak pada tindakannya yang menempatkan nilai sosial budaya sebagai dasar dalam menjalankan rekrutmen politik demi menciptakan peran dan partisipasi perempuan diinternal partai Golkar lebih meningkat dan setara dengan kaum laki-laki.

Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pengurus harian DPD partai Golkar dari adanya keterkaitan dengan kondisi sosial budaya masyarakat melalui penempatan figure perempuan sebagai ketua partai harus menciptakan peran yang setara dan meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik yang lebih massif di daerah Kabupaten Bima.
2. Sebaiknya dalam menerapkan rekrutmen politik pengurus harian DPD partai Golkar Kabupaten Bima harus lebih kepada sebuah prospek yang memperhatikan keterwakilan perempuan sesuai peraturan undang-undang yang menentukan minimal kuota 30 persen keterwakilan perempuan baik sebagai caleg maupun sebagai pengurus partai.
3. Bagi peneliti diharapkan dapat mengembangkan penelitian lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku dan Jurnal:

- Alan Malingi. (2007). *Nika Baronta*. Yogyakarta: Genta Press
- A. Putri Budiatri. (2012). Keterwakilan -- Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR RI dan DPRD). *Jurnal Peran Partai Politik*, 15(4), 19–28.
- Arikunto, Suharsimi. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta; Rineka Cipta
- Ahmadin. (2017). Konflik Sosial Antar Desa Dalam Perspektif Sejarah di Bima. *Madala Education*, 3(1), 224–232.
- Aruni, R. & F. (2018). GENDER DAN POLITIK ; Keterwakilan Perempuan Dalam Politik. *Buku Penerbit Unimal Press*, (April).
- Arwiyah, M. Y. (2012). Status Sosial Ekonomi dan Kualitas Partai Politik dalam. *Jurnal Institut Manajemen Telkom Bandung*, XXVIII(1), 85–92.
- Dermatoto, A. (2008). Sistem Sosial Budaya Indonesia. *Artikel Word to PDF Converter-Unregistered*.
- Elisabeth Anita Dhewy Haryono. (2014). Perempuan Politisi 2014 General Bagaimana Wajah Caleg Perempuan dalam Pemilu 2014? *Jurnal Perempuan*

- Untuk Pencerahan Dan Kesetaraan*, 19(2), 153–159.
- Fakih, Mansour. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta; INSIST-Press.
- Hidayat, M. (2014). Pendekatan integratif-interkonektif: tinjauan paradigmatik dan implementatif dalam pembelajaran pendidikan agama islam. *Jurnal Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, XIX(2), 276–287.
- Hasanuddin. (2017). Nilai dan Karakter Budaya Indonesia. *Universitas Andalas*
- Idris, A. (2014). Partisipasi Politik Perempuan Di Partai Demokrat Pada Pemilihan Anggota Legislatif 2014 Kabupaten Parigi Moutong. *Jurnal Katalogis*, 4(3), 125–136.
- Indonesia, R. (n.d.). Laporan Pembangunan Manusia/Human Development Report 2016.
- John W. Creswell, (2017). *Edisi Ketiga Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*.
- Jongker, 2017. *Keluarga Tuli Humor Rakyat Bima Tempo Doeloe*. Yogyakarta; Lengge
- Komara, E. (2015). Sistem politik indonesia pasca reformasi. *Jurnal Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*, 2(2), 117–124. <https://doi.org/10.15408/sd.v2i2.2814>. Permalink/DOI
- Latifah, I. S. (2011). *Penerapan Affirmative Action Sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Indonesia*.
- Lugas, J. (2018). Budaya Politik Dalam Masyarakat Pragmatis. *Jurnal Lugas*, 2(1), 20–26.
- Made, N., Widayani, D., & Hartati, S. (2014). Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Pandangan Perempuan Bali : Studi Fenomenologis. *Jurnal Psikologi Undip*, 13(2), 149–162.
- Mariati. (2013). “Maja Labo Dahu” Dalam Dinamika Kehidupan Masyarakat Bima.
- Miles, Matthew B, A. Huberman, Michael & Saldana, Johnny. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edisi Ketiga*. Sage Publications: Inc
- Moleong, Lexy J, (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung; Rosda
- Machali, Imam. *Implementasi Pendekatan Integrasi-Interkoneksi dalam Kajian Manajemen dan Kebijakan Islam*. Pada Seminar Nasional Tanggal 15-16 Oktober 2014 oleh PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prodi PI.
- Machmud, Muslimin. (2016). *Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah*. Malang; Selaras
- Nugroho, Riant.D. (2008). *Gender dan Strategi Pengarusutamaanannya di*

Indonesia. Yogyakarta; Pustaka Pelajar

- Naniek I. Taufan, (2011). *Tradisi Dalam Siklus Hidup Masyarakat Sasak, Sumbawa, dan Mbojo*. Bima; Museum Kebudayaan Samparaja Bima
- Nasution, Khoiruddin. *Dalam Bahan Diskusi pada Seminar Nasional Paradigma dan Implementasi Pendekatan Integrasi-Interkoneksi dalam Kajian Pendidikan Islam PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 15-16 Oktober 2014.
- Nimrah, S. (2015). Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014). *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(2), 173–182.
- Norkholis, A. M. dan. (2016). Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari (Studi Living Hadis). *Jurnal Living Hadis*, 1(2), 243–258.
- Nz, N., & Sitepu, P. A. (2017). Perempuan dan Politik pada Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan di Partai Keadilan Sejahtera. *Jurnal Ilmu Politik*, 9(2), 93–110.
- Pandiangan, L. V. (2017). Perempuan Politisi Minangkabau Dalam Dunia Politik: Studi Tentang Alasan Perempuan Memaknai Politik. *Jurnal Politik Muda*, 6(2), 148–155.
- Puspitawati, H. (2013). Konsep, Teori dan Analisis Gender. *Artikel Ilmiah*, 4, 1–13.
- Resti Dwi Jayanti. (2014). Makalah: *Perkembangan Nilai Budaya*
- Ritzer, George. (2014). *Edisi Kedelapan Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Posmodern*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar
- Rahayu, K. W. (2016). Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Analisis Dan Pelayanan Publik*, 2(1), 93–108.
- Ritzer, George. (2018). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada
- Suryana, (2010). *METODE PENELITIAN; Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Buku Ajar Perkuliahan
- Sugiyono, (2011). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung; Alfabeta
- Salim & Syahrur. (2012). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF; Konsep dan Implikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*. Bandung; Citapustaka Media
- Sugiyono, (2017). *STATIKA Untuk PENELITIAN*. Bandung; Alfabeta
- Tridewiyanti, K. (2012). Kesetaraan dan Keadilan Gender di Bidang Politik “Pentingnya Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan di Legislatif.” *Jurnal*

Sumber Lain:

Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender (PGU)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Ahyar, (2014). *Inilah Anggota DPRD Kabupaten Bima* (Online). Lihat: <http://ronamase.blogspot.com>. (akses pada Senin 10 Desember 2018).

2015. *Perempuan Pertama Jabat Kepala Daerah di Bima* (Online). Lihat: <https://www.republika.co.id>. (akses pada Rabu 24 April 2019).

Sejarah Partai Golkar (Online). Lihat: <http://www.golkar.or.id/sejarah-partai-golkar>. (akses pada Selasa 24 September 2019).

Visi Misi Golkar (Online). Lihat: <http://www.golkar.or.id/visi-misi-golkar>. (akses pada Selasa 24 September 2019).

M. Dahlan Abubakar. (2015). *Bupati Bima Ferry Zulkarnain Meninggal Dunia* (Online). Lihat: <https://www.kompasiana.com/www.independen.co/bupati-bima-ferry-zulkarnain-meninggal-dunia>. (akses pada 27 September 2019).

Arti Elektabilitas: Pengertian dan Kaitannya dengan Kampanye Politik (Online). Lihat: <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/arti-elektabilitas-adalah.html>. (akses pada Jum'at September 2019).